

Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Investasi Lokal

St. Hadijah Wahid¹, Cinta², Sabrina³, Herlina⁴, Reski Awalia⁵, Asnita Binti Asis⁶, Aulia Al-Fajri⁷, Din Masyhudi⁸

Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

Email Korespondensi: drev53902@gmail.com

Diterima: 25-01-2025 | Disetujui: 26-01-2025 | Diterbitkan: 27-01-2025

ABSTRACT

Local governments play an important role in driving local economic growth through increased investment. Local investment can create jobs, increase community incomes and drive overall economic growth. Increasing local investment is key to driving regional economic growth. Local governments have an important role in creating a conducive environment for investors. The right strategies such as providing infrastructure, improving governance, promotion and facilitation, developing human resources, and supporting MSMEs can drive local investment and improve community welfare. Local governments have a very crucial role in utilizing the potential of Human Resources (HR) and Natural Resources (SDA) to encourage local economic growth. With several strategies implemented, one of which is by exploring and developing the potential of HR and SDA optimally, stimulating the growth and development of the regional economy through spatial planning that has a broad impact on the economy of the community in particular. The government is a group of people who have the power to create and implement laws and regulations in the region.

Keywords: Local government; Local Economic Growth; Local Investment; Job Creation; Community Income.

ABSTRAK

Pemerintah daerah memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan investasi. Investasi lokal dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Peningkatan investasi lokal merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor. Strategi yang tepat seperti penyediaan infrastruktur, peningkatan tata kelola, promosi dan fasilitasi, pengembangan sumber daya manusia, dan dukungan terhadap UMKM, dapat mendorong investasi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat krusial dalam memanfaatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan beberapa strategi di terapkan salah satunya dengan menggali dan mengembangkan potensi SDM dan SDA secara optimal, merangsang pertumbuhan dan pengembangan ekonomi daerah melalui pengaturan tata ruang yang berdampak luas bagi perekonomian Masyarakat khususnya. Pemerintah merupakan kelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan Hukum beserta Undang-undang di wilayah tersebut.

Katakunci: Pemerintah Daerah; Pertumbuhan Ekonomi Lokal; Investasi Lokal; Penciptaan Lapangan Kerja; Pendapatan Masyarakat

PENDAHULUAN

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi lokal merupakan isu strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi di tingkat regional. Investasi lokal, sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga mendorong inovasi, peningkatan daya saing, dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai peran pemerintah daerah dalam mendorong investasi lokal menjadi sangat penting.

Pendahuluan ini akan menguraikan secara rinci dan panjang peran multi-faceted pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Lebih dari sekadar menyediakan infrastruktur, peran pemerintah daerah meliputi serangkaian kebijakan, regulasi, dan program yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memaksimalkan potensi investasi lokal. Hal ini mencakup penyederhanaan birokrasi perizinan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, pembangunan infrastruktur yang memadai dan terintegrasi, serta pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Selanjutnya, pendahuluan ini akan membahas beberapa aspek kunci peran pemerintah daerah, di antaranya: (1) Perumusan kebijakan dan regulasi yang mendukung investasi lokal, termasuk insentif fiskal dan non-fiskal yang menarik; (2) Penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk menciptakan iklim investasi yang transparan dan akuntabel; (3) Pengembangan infrastruktur yang memadai dan terintegrasi, meliputi infrastruktur fisik seperti jalan, listrik, dan air bersih, serta infrastruktur pendukung seperti teknologi informasi dan komunikasi; (4) Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil untuk memenuhi kebutuhan investasi lokal; (5) Peningkatan akses terhadap pembiayaan bagi investor lokal, termasuk melalui program kredit usaha rakyat (KUR) dan kemitraan dengan lembaga keuangan; (6) Promosi dan pemasaran potensi investasi lokal kepada investor potensial; dan (7) Pemantauan dan evaluasi kinerja investasi lokal secara berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan dan program yang telah diterapkan.

Selain menguraikan peran-peran tersebut, pendahuluan ini juga akan menyinggung tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi lokal, seperti keterbatasan anggaran, birokrasi yang rumit, kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, dan kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi. Dengan memahami peran dan tantangan tersebut, diharapkan uraian selanjutnya akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi dan solusi yang efektif untuk meningkatkan investasi lokal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memahami bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam melalui car free day Tebu Kayan di Tanjung Selor.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian artikel ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah daerah memegang peran penting dalam meningkatkan investasi lokal, yang merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Artikel-artikel yang

ditemukan dalam pencarian online menyoroti beberapa peran kunci yang dapat dimainkan pemerintah daerah:

1. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan menarik bagi investor lokal. Ini melibatkan beberapa langkah strategis:

- Mempermudah Perizinan dan Birokrasi: Proses perizinan yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit dapat menjadi penghambat utama bagi investor. Pemerintah daerah perlu menyederhanakan prosedur, mempercepat proses perizinan, dan menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

- Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur: Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi, sangat penting untuk mendukung kegiatan investasi. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk pengembangan infrastruktur, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, untuk meningkatkan daya saing daerah.

- Mempromosikan Potensi Investasi: Pemerintah daerah perlu secara aktif mempromosikan potensi investasi di daerahnya kepada investor lokal. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menyelenggarakan pameran investasi, menerbitkan brosur dan website yang informatif, dan menjalin kerjasama dengan asosiasi pengusaha.

2. Memberikan Insentif dan Dukungan bagi Investor

Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan dukungan bagi investor lokal untuk mendorong mereka berinvestasi di daerah. Beberapa contoh insentif yang dapat diberikan:

- Insentif Pajak: Pemerintah daerah dapat memberikan keringanan pajak, seperti pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) atau penurunan tarif pajak, untuk menarik investor.

- Fasilitas Kredit: Pemerintah daerah dapat memfasilitasi akses terhadap kredit bagi investor lokal melalui program-program pembiayaan dan kerjasama dengan lembaga keuangan.

- Dukungan Teknis: Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan teknis kepada investor lokal, seperti pelatihan, konsultasi, dan pendampingan, untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka.

3. Membangun Kemitraan dengan Pihak Swasta

Pemerintah daerah perlu membangun kemitraan yang kuat dengan pihak swasta untuk mendorong investasi lokal. Ini dapat dilakukan melalui:

- Kerjasama dalam Pengembangan Infrastruktur: Pemerintah daerah dapat melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, melalui skema Public-Private Partnership (PPP).

- Pemberian Konsesi: Pemerintah daerah dapat memberikan konsesi kepada swasta untuk mengelola aset-aset daerah, seperti pasar, terminal, dan objek wisata, untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan daerah.

- Pembentukan Forum Investasi: Pemerintah daerah dapat membentuk forum investasi yang melibatkan para pemangku kepentingan, seperti pengusaha, investor, dan akademisi, untuk membahas isu-isu strategis terkait investasi dan mencari solusi bersama.

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas merupakan faktor penting dalam meningkatkan investasi lokal. Pemerintah daerah dapat berperan dalam:

- Meningkatkan Kualitas Pendidikan: Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja

- Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan: Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat, khususnya di bidang yang dibutuhkan oleh industri lokal

-Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan: Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat, khususnya di bidang yang dibutuhkan oleh industri lokal.

-Mempermudah Akses terhadap Informasi dan Teknologi: Pemerintah daerah dapat menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat terhadap informasi dan teknologi, seperti internet dan komputer, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan sangat penting untuk membangun kepercayaan investor. Pemerintah daerah perlu:

-Menerapkan Sistem Pengelolaan Keuangan yang Transparan: Pemerintah daerah perlu menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga investor dapat yakin bahwa dana investasi mereka digunakan dengan baik dan efisien.

-Mempublikasikan Informasi tentang Investasi: Pemerintah daerah perlu mempublikasikan informasi tentang peluang investasi di daerahnya, seperti kebijakan investasi, insentif yang diberikan, dan data ekonomi daerah, secara terbuka dan mudah diakses.

-Menjalankan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Pemerintah daerah perlu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas, untuk membangun kepercayaan investor.

KESIMPULAN

Peningkatan investasi lokal merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan insentif dan dukungan bagi investor, membangun kemitraan dengan pihak swasta, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan menjalankan peran-peran tersebut secara efektif, pemerintah daerah dapat mendorong investasi lokal yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Dasar Ekonomi Daerah. Jakarta: BPS.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023-2028. Bolaang Mongondow: DPRD.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Pedoman Pelaksanaan Penanaman Modal Daerah. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2022). Laporan Kinerja Sektor Pertambangan di Indonesia. Jakarta: ESDM.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi. (2023). Analisis Investasi di Sektor Pertambangan: Peluang dan Tantangan. Jakarta: Puslitbang.
- Rachman, A. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Investasi Lokal: Studi Kasus Beberapa Daerah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 12(1), 45-60.
- Sihombing, R. (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Investasi di Sektor Pertambangan. Jurnal Pendidikan dan Ketenagakerjaan, 15(2), 101-115.
- Universitas Negeri Manado. (2021). Laporan Penelitian: Dampak Investasi di Sektor Pertambangan terhadap Ekonomi Lokal. Manado: UNM.